

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018
DI DESA TANJUNG RIA KECAMATAN SEPAUK
KABUPATEN SINTANG**

Oleh

Aprilia Seli

NIM. E1051151080

Prof. Dr. A.B.Tangdililing, MA. Drs. Abi Sofyan, M.Si

Email: Apriliaselly71@gmail.com

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura

ABSTRAK

Aprilia Seli: Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 Di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang. **Skripsi. Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. Pontianak. 2019.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor penyebab masyarakat memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada “Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang”. Metode yang digunakan oleh peneliti ialah deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Adapun teori yang digunakan ialah tentang “faktor-faktor yang memperkirakan tinggi-rendahnya partisipasi politik seseorang” Ramlan Surbakti, ia mengemukakan untuk memperkirakan tinggi-rendahnya partisipasi politik seseorang ada empat aspek yaitu kesadaran politik, kepercayaan kepada pemerintah, status sosial, dan status ekonomi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari empat aspek tersebut status sosial merupakan aspek yang paling dominan karena hal tersebut sangat mempengaruhi tinggi-rendahnya tingkat partisipasi seseorang dan bukan berarti mengabaikan aspek lain tetapi dalam pelaksanaannya status sosial memang sangat berpengaruh, dengan semakin tinggi status sosial seseorang maka partisipasinya akan semakin tinggi. Status sosial agar pemilu atau pun pilkada dapat dihadiri semua masyarakat tanpa memiliki alasan status sosial tersebut tidak ada lagi angka rendah untuk partisipasi politik di daerah kita.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Daerah, Kesadaran Politik, Kepercayaan, Status Sosial, Status Ekonomi

ABSTRACT

POLITICAL PARTICIPATION OF THE PEOPLE IN THE SELECTION OF THE GOVERNOR OF WEST KALIMANTAN 2018 IN TANJUNG RIA VILLAGE, SEPAUK DISTRICT, SINTANG DISTRICT

This study aims to determine the factors that cause people to choose not to vote in the "Political Participation of the Community in the Election of the Governor of West Kalimantan in 2018 in Tanjung Ria Village, Sepauk District, Sintang Regency". The method used by researchers is qualitative descriptive research procedures that produce descriptive data in the form of written words or writings of people and observed behavior. The theory used is about "factors that predict the high and low of political participation of a person" Ramlan Surbakti, he argued for estimating the high and low political participation of a person there are four aspects namely political awareness, trust in government, social status, and economic status. The results show that of these four aspects social status is the most dominant aspect because it greatly influences the level of participation of a person and does not mean ignoring other aspects but in the implementation of social status it is very influential, with the implementation of the election or regional election team to pay attention matters related to social status so that elections or even local elections can be attended by all people without having a reason for the social status there is no longer a low number for political participation in our area.

Keywords: Political Participation, Regional Head Election, Political Awareness, Trust, Social Status, Economic Status

A. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi Yang mendasari demokrasi dan partisipasi adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat maka masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam proses politik dan ikut serta menentukan segala keputusan yang nantinya akan menyangkut dan mempengaruhi hidupnya, pada Tahun 2015, pemerintah telah mengesahkan dua Undang-Undang tersebut yaitu Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang 8 tahun 2015 disebutkan, bahwa pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota dilaksanakan 5 tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan diselenggarakan melalui 2 tahapan, yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Dalam hal ini, masyarakat adalah komponen penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemilu. Karena pada dasarnya, hanya kekuatan pemilihan masyarakatlah yang bisa menentukan nasib Negara dan bangsa kedepannya. Setiap warga Negara, apapun latar belakangnya seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, dan golongan, mereka memiliki hak yang sama untuk berserikat dan berkumpul, menyatakan pendapat, menyikapi secara kritis kebijakan pemerintah dan pejabat Negara. Hak ini disebut hak politik secara luas dapat langsung diaplikasikan secara kongkrit melalui pemilihan umum.

Beranjak dari hal tersebut, relatif rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak suara pilih pada pilkada dapat diakibatkan oleh berbagai penyebab, seperti hasil dari pilkada yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat

hingga berujung dengan penyesalan, peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak terjamin setelah selesainya pilkada, ataupun tidak sempurnanya kinerja dalam pemungutan suara paska pilkada berlangsung. Maka dari tu, rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak suara pilih tidak bisa dikatakan sebagai dampak dari rendahnya tingkat pendidikan atau pengetahuan masyarakat terhadap politik.

Kesadaran dan pemahaman politik merupakan penunjang dalam mewujudkan stabilitas politik masyarakat. Dengan kesadaran dan pemahaman politik pula setiap sikap dan perilaku masyarakat secara partisipasi dapat terwujud sebagaimana mestinya. Namun demikian, sikap dan perilaku anggota masyarakat dalam partisipasi politik kadangkala mengarah pada sikap apatis, sinisme, dan arogan. Sehingga hal ini mempengaruhi partisipasi mereka dalam pemilihan kepala daerah, yang akhirnya mereka enggan memberikan hak suara dalam pemilihan dan juga tidak menghadiri kegiatan-kegiatan politik seperti salah satunya kampanye terbuka yang diselenggarakan dari

pasangan calon yang maju. Setiap masyarakat memiliki prefensi dan kepentingan masing-masing untuk menenukan pilihan mereka dalam pilkada. Bisa dikatakan, bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu pilkada tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam pilkada dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam, tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga Negara. Pada Tahun 2018, Provinsi Kalimantan Barat melakukan Pemilukada yang di selenggarakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat. Ada tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang ikut serta dalam pilkada Kalimantan Barat dan telah lulus dalam verifikasi oleh pihak KPU Provinsi Kalimantan Barat.

Secara administratif Kabupaten Sintang, terdiri atas 14 (empat belas) Kecamatan, dan berdasarkan data jumlah

pemilih pada tahun 2018 yang di dapatkan penulis dari Sumber Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang yang terdapat 284.154 pemilih, pada pemilihan Gubernur Tahun 2018. Sebagaimana salah satu Desa yang menarik untuk diteliti oleh penulis adalah Desa Tanjung Ria. Desa Tanjung Ria ini terletak di pusat Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang.

Alasan penulis memilih Desa Tanjung Ria untuk dijadikan tempat penelitian adalah bentuk partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak suara pilih pada pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) tahun 2018 masih tergolong rendah bahkan dari 39 Desa di Kecamatan Sepauk, tingkat partisipasi paling Rendah di duduki oleh Desa Tanjung Ria yakni mencapai 59,6% atau 1.537 jiwa yang menggunakan hak suara pilih dan yang tidak menggunakan hak suara pilih sebanyak 40,4% atau 1.043 jiwa.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Ada pun yang menjadi identifikasi masalah adalah ada 40,4% masyarakat

Desa Tanjung Ria tidak menghadiri atau tidak memberikan partisipasi politiknya pada saat hari pencoblosan yaitu tanggal 27 juni 2018.

1.3. Fokus Penelitian

faktor apa saja faktor penyebab masyarakat memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang.

1.4. Rumusan Masalah

Permasalahan penelitian, yaitu "Apa saja faktor penyebab masyarakat memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang?"

1.5. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui faktor penyebab masyarakat memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang.

1.6. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengungkapkan manfaat yang hendak diperoleh baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis. Adapun manfaat tersebut adalah:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi perkembangan ilmu politik khususnya untuk yaitu Tentang Partisipasi Politik.

1.6.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. KPUD Sintang,
2. Pemerintah Desa,
3. Masyarakat.

B. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Partisipasi Politik

Miriam Budiardjo (dalam Gatara 2008, 310) mendefinisikan “partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik

yakni dengan cara memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*)”. (Ramlan Surbakti 2010, 180) mendefinisikan “partisipasi politik ialah keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya”. Sesuai dengan istilah partisipasi, maka partisipasi (politik) berarti keikutsertaan warga Negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

2.1.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Manusia merupakan makhluk sosial politik, karena itu dalam setiap gerak langkah kehidupan mereka sangat membutuhkan bantuan dari orang lain. Hal ini di dasarkan pada upaya masing-masing individu untuk mencapai tujuannya. Maka dalam upaya memenuhi setiap kebutuhan hidup banyak faktor yang menjadi pertimbangan. Begitu juga dalam partisipasi politik alasan-alasan yang dimiliki oleh individu akan dilaksanakan,

agar mereka memiliki nilai tawar dalam segala bentuk kebijakan politik.

Menurut Surbakti (2010, 184) bahwa “faktor-faktor yang di perkirakan mempengaruhi tinggi-rendahnya partisipasi politik seseorang ialah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik)”. Sebagaimana yang dimaksud penjelasannya sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian. Seseorang terhadap lingkungan masyarakat tempat dia hidup.
2. Sedangkan kepercayaan terhadap pemilih pemerintah yaitu, penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat di pengaruhi atau tidak. Apabila pemerintah sebelumnya dianggap tidak dapat mengakomodir aspirasi masyarakat, maka pada pemilihan politik selanjutnya akan mempengaruhi partisipasi politik masyarakat.

Berdasarkan tinggi-rendahnya dua faktor tersebut, Paige (dalam Surbakti 2010,184)

membagi partisipasi menjadi empat tipe, yaitu:

1. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, partisipasi politik cenderung aktif.
2. Apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatis)
3. Apabila kesadaran politik tinggi, tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah, partisipasi cenderung militant-radikal.
4. Apabila kesadaran politik sangat rendah, tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi, partisipasi cenderung tidak aktif (pasif).

Faktor-faktor yang dikemukakan diatas bukanlah faktor-faktor yang berdiri (bukan variabel yang independen). Yang berarti tinggi rendah faktor tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti staus sosial, dan status ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi. Yang dimaksud dengan status sosial ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan, dan pekerjaan. Yang di maksud dengan status ekonomi ialah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan kepemilikan kekayaan. Hal ini diketahui dari pendapatan, pengeluaran, ataupun kepemilikan benda-benda berharga. Seseorang yang memiliki status sosial dan status ekonomi yang tinggi diperkirakan tidak

hannya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik, serta sikap kepercayaan terhadap pemerintah (Surbakti 2010, 185).

2.1.3 Kerangka Pikir Penelitian

Bagian ini merupakan unsur yang paling penting di dalam penelitian, karena pada bagian ini peneliti mencoba menjelaskan fenomena yang sedang diamati dengan menggunakan teori-teori relevan dengan penelitiannya. Maka dari itu dijelaskan, bahwa yang menjadi identifikasi masalah dari penelitian yang berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang. Maka diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan agar dapat meningkatkan partisipasi politik dengan menggunakan hak suara pilih dalam pemilu pada di Kabupaten Sintang Terkhususnya di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk.

Maka untuk mengkaji masalah ini, peneliti menggunakan teori menurut Surbakti (2010,184) bahwa “faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi tinggi-rendahnya partisipasi politik seseorang

ialah kesadaran politik, kepercayaan kepada Pemerintah (sistem politik), status sosial, status ekonomi.

Sehingga dalam penelitian ini, peneliti dapat menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang. Maka diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan agar dapat meningkatkan partisipasi politik dengan menggunakan hak suara pilih dalam pemilu pada di Kabupaten Sintang Terkhususnya di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk.

C. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan metode kualitatif. Dimana dalam penelitian ini yaitu berusaha mendapatkan informasi yang selengkap mungkin mengenai Apa saja faktor penyebab masyarakat memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan

Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2007, 4), mengatakan bahwa dengan penelitian pendekatan kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.

3.2. Langkah-Langkah Penelitian

Menurut Masyhuri dan Zainudin (2008, 46), untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

dengan cara mencari teori-teori, informasi, mempelajari literatur, majalah-majalah ilmiah dan laporan-laporan untuk menemukan konsep-konsep dan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian mengenai Apa saja faktor penyebab masyarakat memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang. dan juga untuk memperoleh data yang

relevan guna menunjang dan memperluas pembahasan yang disajikan penulis dan penelitian

2. Penelitian lapangan (*Field Research*)

yaitu dengan mengadakan penelitian langsung kelapangan terhadap objek yang diteliti guna mengumpulkan data-data, informasi, dan fakta yang ada, dimana sifatnya relevan dengan permasalahan penelitian terutama untuk memperoleh gambaran umum tentang mengenai Apa saja faktor penyebab masyarakat memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang.

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

3.3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Ria, Desa Tanjung Ria berada di Kecamatan Sepauk Tepatnya di Kabupaten Sintang. Adapun alasan yang menjadi kertertarikan peneliti memilih di Desa Tanjung Ria sebagai lokasi penelitian, karena ada 1.043 jiwa masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih. Dan peneliti ingin

mengetahui mengenai Apa saja faktor penyebab masyarakat memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang.

3.4. Subjek dan Objek Penelitian

3.4.1. Subjek Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik *purposive*, menurut Sugiyono (2011, 84) “teknik *purposive* nantinya mengambil sampel data dengan pertimbangan tertentu”. Dengan pertimbangan tertentu seperti informan tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang dapat memberikan informasi secara akurat tentang permasalahan penelitian ini. Maka yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Sintang.
2. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Sepauk.
3. Masyarakat di Desa Tanjung Ria.

3.5. Objek Penelitian

3.5.1. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan fakta penelitian maka peneliti menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara, yaitu pertanyaan yang telah di siapkan sebelumnya, sebagai pedoman untuk memperoleh data kepada sumber informan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Alat dokumentasi, yaitu foto copy dan Kamera.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan adalah :

1. Wawancara

Menurut Arikunto (2002, 145), “*interview* atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara

2. Dokumentasi

Menurut Bungin (dalam Gunawan 2014, 177) “ Teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis”. Disamping itu, dokumentasi akan

dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang telah dipublikasikan oleh media massa setempat terkait dengan tujuan penelitian ini.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bognan & Biken (dalam Moleong 2007, 248), adalah “upaya yang dilakukan dengan berjalan dengan data, mengorganisasikan data, memilih-memilahnya menjadi kesatuan yang dapat dikelola, mensintetiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.

Selanjutnya Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2009, 246), menemukan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dapat dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus secara tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, serta memulai tiga komponen diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data .
2. Display Data
3. Verifikasi

3.8. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan Triangulasi, dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono 2014, 125). Triangulasi dilakukan dengan cara:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah di peroleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu peneliti mewawancarai masyarakat yang termasuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) Tahun 2018.

2. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber data yang akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi

atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda (Sugiyono 2012,127)

3. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dukumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono 2007,274)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesadaran Politik

Kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat tempat dia hidup, Surbakti (2010,184).

Memang pada dasarnya sikap masyarakat yang apatis ini tidak bisa disalahkan juga, apa lagi dalam kaitannya

dengan pemilihan kepala daerah bahwa masyarakat hanya diberi kesempatan untuk menentukan atau memutuskan pemimpin daerahnya yang layak untuk menjadi pemimpin daerahnya, dengan memberikan hak suara pilih pada saat pemilihan berlangsung dan itu hanya merupakan sebuah hak. Sebagaimana mengingat bahwa masyarakat yang tidak berpartisipasi untuk menggunakan hak suara pilihnya juga merupakan sebuah hak mereka dalam memutuskan atau menentukan untuk ikut serta atau tidak, pada saat pemilihan kepala daerah berlangsung.

Tentu dengan adanya sikap apatis yang ada dilingkungan masyarakat seperti ini, maka kesadaran politiknya yang harus ditingkatkan. Di mana masyarakat harus diberikan pandangan yang positif terhadap politik dengan memberikan pendidikan politik. Agar sikap masyarakat memandang politik itu menjadi lebih baik, sehingga minat dan perhatiannya terhadap politik itu tinggi, apalagi tujuan dalam menentukan sebuah pemimpin, khususnya Gubernur dan Wakil Gubernur dalam penelitian ini.

2. Kepercayaan Kepada Pemerintah (Sistem Politik)

Kepercayaan kepada pemerintah adalah penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak. Apabila pemerintah sebelumnya dianggap tidak mengakomodir aspirasi masyarakat, maka pada pemilihan politik selanjutnya akan mempengaruhi partisipasi politik masyarakat, Surbakti (2010,184). Dalam hal ini juga dapat dikatakan bahwa figur kandidat calon yang ditampilkan merupakan sebuah persoalan atau pengaruh yang besar juga bagi pemilih atau masyarakat untuk menggunakan hak suara pilihnya atau tidak. Sebagaimana, jika dibandingkan dengan hasil wawancara bersama informan masyarakat yang tidak menggunakan hak suara pilih sebelumnya, mereka bersikap sinisme dikarenakan figur-figur kandidat pasangan calon yang ditampilkan pada saat pemilihan kepala daerah serentak kalimantan barat tahun 2018 tidak mewakili sebagian pilihan mereka agar dapat lebih baik lagi kedepannya nanti.

Hal ini dikarenakan mereka meragukan kredibilitas yang dimiliki oleh para kandidat pasangan calon yang ditampilkan pada pemilihan kepala daerah serentak kalimantan barat tahun 2018, karena mereka merasa bahwa belum ada figur-figur yang benar-benar dapat membawa amanah mereka kedepannya. Anggapan mereka apakah para kandidat pasangan calon yang bersaing ini dapat mengakomodir aspirasi mereka atau tidak dan terutama dalam menepati janji-janji politik mereka pada saat kampanye. Satu sisi mereka menginginkan pengalaman mereka pada pilkada sebelum-sebelumnya yang telah membuat mereka kecewa.

3. Status Sosial

Dalam arti yang luas status sosial adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat. Status sosial berhubungan erat dengan hak dan kewajiban. Status sosial memberikan bentuk dan pola pada interaksi sosial. Dengan demikian berarti interaksi sosial berhubungan erat dengan status sosial.

Sedangkan berkaitan status sosial dalam penelitian ini yaitu, pengaruh status

sosial terhadap partisipasi politik seperti kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan, dan pekerjaan. seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi, diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik, serta sikap kepercayaan terhadap pemerintah. Surbakti (2010,185). status sosial yang tinggi, diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik, serta sikap kepercayaan terhadap pemerintah. Surbakti (2010,185).

4. Status Ekonomi

Status ekonomi adalah kedudukan seseorang atau keluarga dimasyarakat berdasarkan pendapatan perbulan. Status ekonomi dapat dilihat dari pendapatan yang disesuaikan dengan harga pokok (Kartono, 2006). Hal ini juga berdasarkan pengamatan peneliti terkait dengan aspek pendapatan dan kekayaan dalam faktor status ekonomi bahwa, peneliti melihat pendapatan dalam penghasilan pekerjaan kedua infoman tersebut cukup terbilang tinggi, belum lagi pengamatan

peneliti terhadap tempat tinggal atau rumah yang ditempati oleh kedua informan tersebut, juga cukup terbilang dalam masyarakat golongan kelas keatas. Maka dengan kedua aspek yang mereka miliki inilah yang membuat minat mereka untuk berpartisipasi dalam menggunakan hak suara pilih cukup tinggi. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa dengan pendapatan dan kekayaan yang mereka miliki itu juga yang dapat membuat pengetahuan politik atau pendidikan politik yang mereka miliki cukup baik, sehingga dengan adanya hal tersebut, membuat mereka dengan secara sendirinya sadar mengenai ada hak mereka dalam menentukan pemimpin di daerahnya sendiri, khususnya pemilihan kepala daerah kalimantan barat tahun 2018 di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

pada bagian ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang ada. Dari hasil temuan studi ini sebagaimana dipaparkan dalam bab-bab

sebelumnya, maka faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat Desa Tanjung Ria dalam menggunakan hak suara pilihnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor kesadaran politik

Dalam temuan penelitian terdapat 3 aspek yang mempengaruhi masyarakat tidak menggunakan hak suara pilihnya pada pilkada serentak tahun 2018 di Kalimantan Barat yaitu: Pertama, mereka tidak menyadari mengenai hak politik dan kewajibannya mereka sebagai warga dilingkungannya. Kedua, rendahnya pengetahuan politik dalam diri mereka. Ketiga, kurangnya minat dan perhatian mereka terhadap proses politik ataupun Pilkada Tahun 2018 di Kalimantan Barat. Sehingga dari tiga aspek tersebut, timbulnya sikap yang masa bodoh atau sikap apatis bagi masyarakat yang tidak menggunakan hak suara pilihnya terhadap proses pilkada tahun 2018 di Kalimantan Barat.

2. Faktor kepercayaan kepada pemerintah

Dalam temuan penelitian ini ada 2 aspek yang mempengaruhi masyarakat tidak menggunakan hak suara pilihnya pada pilkada serentak tahun 2018 di Kalimantan Barat yaitu: Pertama, masyarakat yang tidak menggunakan hak suara pilihnya menilai pemerintah sebelumnya tidak dapat dipercaya, hal ini dikarenakan kurangnya pelayanan kinerja pemerintah atau pemimpin sebelumnya, sehingga kepuasan masyarakat tidak begitu terlalu terjamin. Kedua, masyarakat yang tidak menggunakan hak suara pilihnya menilai pemerintahan sebelumnya tidak dapat dipengaruhi, hal ini dikarenakan aspirasi masyarakat kadang-kadang tidak terpenuhi. Sehingga dari 2 aspek ini berdampak kepada partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak suara pilih pada pilkada Tahun 2018 di Kalimantan Barat. Dimana timbulnya sikap sinisme masyarakat yang tidak menggunakan hak suara pilihnya, terhadap figur-figur para kandidat pasangan calon yang tampil pada pilkada serentak tahun 2018 di Kalimantan Barat.

3. Faktor status sosial

Terdapat 3 aspek yaitu keturunan, pendidikan, dan pekerjaan. dalam temuan penelitian ini yang menjadi pengaruh besar terhadap masyarakat tidak menggunakan hak suara pilihnya pada pilkada serentak tahun 2018 di Kalimantan Barat yaitu aspek pekerjaan. sebagaimana bahwa pekerjaan tertentu terutama dalam pekerjaan dibidang sektor swasta juga dapat mempengaruhi masyarakat untuk memutuskan ikut terlibat berpartisipasi menggunakan hak suara pilih atau tidak pada pilkada serentak Tahun 2018 di Kalimantan Barat. Di tambah dengan timbulnya sikap apatis juga kepada masyarakat yang tidak menggunakan hak suara pilihnya, sehingga lebih mementingkan pekerjaan yang mereka geluti ketimbang memilih untuk berpartisipasi dalam menggunakan hak suara pilihnya pada pilkada tahun 2018 di Kalimantan Barat.

4. Faktor status ekonomi

Terdapat 2 aspek yaitu pendapatan dan kekayaan. Dalam hal ini status ekonomi masyarakat di Desa Tanjung Ria tergolong menengah, dikarenakan pertumbuhan perekonomian yang cukup meningkat di Desa

Tanjung Ria, hal ini tidak terlepas dari pembangunan ekonomi di Desa Tanjung Ria terlihat mulai berkembang. Sehingga terkait dengan faktor status ekonomi ada pengaruhnya, namun tidak menjadi pengaruh yang besar hanya sebagian kecil, salah satunya masyarakat yang berpenghasilan kerja dibidang sektor swasta yaitu masyarakat yang kesehariannya bekerja di sungai sebagai pekerja harian mencari emas atau nge'jek (bahasa daerah masyarakat kecamatan sepauk) yang selalu mempertimbangkan antara pendapatan penghasilan kerja dengan partisipasi politiknya dalam bentuk menggunakan hak suara pilih.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Faktor Kesadaran politik

Di harapkan kepada seluruh partai politik yang ada di Kabupaten Sintang dan KPU Kabupaten Sintang maupun pihak-pihak yang terkait, agar kedepannya dapat benar-

benar melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat, guna membangun kesadaran politik yang baru dikalangan masyarakat baik kabupaten, kecamatan maupun desa

2. Untuk Faktor kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik)

Dalam hal ini diharapkan kepada yang sedang menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, agar segera cepat dapat mempertanggung jawabkan apa yang sudah menjadi tujuannya dalam mencalonkan diri sebagai pemimpin agar masyarakat tidak merasa kecewa lagi, sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin maupun jajaran pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Sintang Kecamatan Sepauk Desa Tanjung Ria dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin maupun jajaran pemerintah daerah Khususnya Kabupaten Sintang dan kembali meramaikan pemilu atau pilkada kedepannya nanti, terutama untuk berpartisipasi dalam menggunakan hak suara pilih.

3. Untuk faktor status sosial dan status ekonomi

Peneliti menyarankan agar kedepannya masyarakat khususnya di Desa Tanjung Ria tidak hanya menunggu dari penyelenggara KPU Kabupaten Sintang dan juga kandidat pasangan calon, untuk mendapatkan informasi, tetapi lebih kemasyarakat sendiri yang harus bergerak untuk mencari informasi tersebut terkait dengan pilkada. Masyarakat juga harus berpikir dan menganggap ada kepentingan mereka terhadap proses pemilu ataupun pilkada. Dan juga harus menganggap ada kepentingan mereka untuk merespon secara positif informasi-informasi, mengenai kandidat pasangan calon, serta pelaksanaan pilkada tersebut, sehingga hal itu bisa menjadi bagian dari sumber informasi masyarakat untuk mempertimbangkan penting atau tidaknya dalam menggunakan hak suara pilih pada saat momen-momen pemilihan.

F. DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suarsini. 2002.
Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek.

Gatara, Sahid. 2008.
Ilmu Politik (Memahami dan Menerapkan). Bandung: Pustaka Setia.

Marana, Rafael Raga, 2007.
Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta: Rineka Cipta

Moleong, Lexy J. 2007.
Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT . Remaja Rosdakarya.

Rush, M dan Althoff, P . 2005.
Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: PT. Raja Grafino.

Sugiyono. 2012.
Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta CV.

Sugiyono. 2014.
Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta CV.

Sastroadmodjo, Sudijono.
1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Pers

Soeharno, 2004.
Diktat Kuliah Sosiologi Politik. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Surbakti, Ramlan. 2010.
Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo.

Rudini Aspiran, 2017.
(Jurnal Skripsi) *Faktor-Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 di kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang*. Di akses pada Hari Senin Tanggal 11 maret 2019 dari Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

Rona Desmara Putra, 2014.
(Jurnal Skripsi) *Faktor yang menyebabkan masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013 di TPS 5 RT 4 RW 1 kelurahan tuah karya kecamatan tampan*. Di akses pada hari senin tanggal 15 maret 2019, pada pukul 19.00 WIB
<http://www.neliti.com/jom-fisip-untan?page=175>